

RADAR BERAU

EDISI SELASA 23 APR 2024

AKTUAL & TERPERCAYA





DUA RUMAH DAN SATU MOBIL TERBAKAR DI GANG RAHAYU







Pers Rilis Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor, di Kantor Polres Berau, Senin (22/4/2024).

POLRES BERAU BERSAMA POLRES BULUNGAN MERINGKUS TIGA TERSANGKA PENCURIAN MOTOR SEBANYAK 21 UNIT

TANJUNG REDEB – Satreskrim Polres Berau bersama Satreskrim Polres Bulungan berhasil meringkus 3 orang tersangka terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

Dari pengungkapan kasus tersebut, sebanyak 21 unit kendaraan bermotor yang telah mereka dapatkan. Dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau.

Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo didampingi Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Ardian Rahayu Priatna mengatakan ini merupakan kasus pencurian lintas provinsi. keempat pelaku tindak pidana Curanmor ini diamankan di Jalan Pulau Panjang, Gg. Gubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana curanmor di Jalan Pulau Panjang Gg. Bubuhan Kecamaran Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Selasa (16/4/2024) lalu.

"Identitas pelaku yakni Asurddin, Edy Supianto, dan Hasrulla," ungkapnya.

AKBP Steyven menjelaskan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di berbagai lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara, seperti di Jalan Pemuda, Jalan Rambutan, Jalan Gunung Panjang, dan berbagai lokasi di Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Gunung Tabur serta Kabupaten Malinau.

Ketiga tersangka tersebut diamankan beserta sejumlah barang bukti. Termasuk 17 unit kendaraan bermotor dan beberapa peralatan yang mendukung tersangka melakukan aksinya.

"Tidak semua barang bukti diamankan di Polres Berau. 13 unit berada di Polres Berau dan 4 unit untuk Polres Bulunga," tuturnya.

Dirinya menyampaikan kronologi kejadian penangkapan pelaku tindak pidana Curanmor ini, penangkapan pertama dilakukan di wilayah hukum Polres Berau. Kemudian, pada tanggal (17/4/2024) lalu, Polres Berau melakukan pengembangan penyelidikan ke Kabupaten Malinau untuk mengambil barang bukti untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Kendati demikian, tiga tersangka tersebut terjerat Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara 9 tahun.

"Selain itu, Pasal 65 KUHP juga relevan dalam kasus ini, yang menyatakan bahwa dijatuhkan hanya satu pidana, ditambah sepertiga dari hukuman maksimum, dalam perbarengan beberapa perbuatan kejahatan," tandasnya. (ril/dez)

Reporter: Aril Syahrulsyah

Editor: Dezwan





Si jago merah yang melahap dua raham dan satu mobil di Gang Rahayu, Jalan Durian III, Berau. (ARIL/MEDKAL)

DUA RUMAH DAN SATU MOBIL TERBAKAR DI GANG RAHAYU

TANJUNG REDEB - Kebakaran kembali terjadi di Jalan Durian III, Gg. Rahayu, Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redeb, sekitar pukul 23.30 Wita, Senin, (22/4/2024).

Dalam upaya untuk memadamkan api yang mengamuk, Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, TNI/Polri, bersama warga sekitar turut bergotong royong dan membantu memadamkan api yang berkobar yang tak kunjung padam.

Selain itu, TNI/Polri dan warga sekitar turut membantu pemilik rumah yang berada disekitar area kebakaran untuk memindahkan harta bendanya yang masih bisa diselamatkan.

Dari pantauan awak Media Kaltim, untuk sementara diketahui dua rumah pribadi dan satu unit kendaraan roda empat hangus terbakar, adapun bangsalan delapan pintu mengala-

mi kerusakan akibat kebakaran tersebut.

Sampai saat ini, penyebab terjadinya kebakaran ini masih dalam tahap penyelidikan pihak terkait dan berapa kerugian yang ditaksir akibat peristiwa ini.

Upaya penanganan masih terus dilanjutkan untuk menenangkan api yang masih berkobar untuk meminimalisir kerugian yang dialami. (ril/dez)

Reporter: Aril Syahrulsyah Editor: Dezwan









EDISI SELASA 23 APR 2024



TAK LAGI BERMINAT MAJU PILKADA, MUSTAQIM: Kontestasi Politik Butuh uang banyak





DIGADANG MAJU PILKADA 2024, MAKMUR MARBUN: SAYA IKUT ARAH ANGIN

PENAJAM PASER UTARA

- Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengungkapkan akan mengikuti instruksi Presiden RI sebagai pimpinannya dalam menjalankan tugas. Termasuk dalam menentukan arah dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dengan menjabat sebagai Direktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Makmur dipercayai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi kepala daerah sementara di PPU sejak 19 September 2023. Tugas tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan pasca habisnya masa kepemimpinan pasangan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Hamdam periode 2018-2023.

Makmur belakangan digadang-gadang layak menjadi Calon Bupati PPU oleh berbagai pihak. Pasalnya, apa yang telah dilakukan untuk daerah berjuluk Benuo Taka ini dinilai membawa kemajuan untuk masyarakat.

Saat ditanya Media Kaltim beberapa waktu lalu mengenai minatnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada PPU 2024, Makmur menjawab akan menunggu arahan Presiden terlebih dahulu. Karena menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya perlu untuk mengikuti setiap instruksi yang diberikan padanya dalam menjalankan tugas.

"Saya nunggu arahan dari pimpinan dulu, Pak Presiden. Kan yang menugaskan saya ke sini (PPU) kan beliau. Nanti saya tanya, Pak setelah ini saya mau bapak kemanain? Kamu balik kandang, atau ke Solo aja, ngurusin delman. Ya saya nurut saja," ujarnya.

Adanya dorongan untuk berlaga menjadi kepala daerah definitifini, dirinya juga mengakui telah



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat diwawancarai usai kegiatan buka puasa bersama insan pers PPU, Senin (8/4/2024) lalu. (Robbi/MKN)

mendengar secara langsung dari masyarakat yang ditemuinya. Meski begitu, Makmur menyampaikan bahwa dirinya akan tetap fokus pada pekerjaan yang saat ini masih diamanahkan padanya hingga selesai.

"Malah mereka (masyarakat) yang ngomong, saya malah nangis sendiri. Saya sampai bingung. Ya, biarkanlah masyarakat yang menilai apa yang saya kerjakan. Tapi tidak maunya saya, maunya masyarakat seperti apa? Nanti kita lihat. Yang penting saya bekerja untuk masyarakat, dan saya fokus di situ," tegasnya.

"Persoalannya nanti bulan berapa, bagaimana arahannya, saya juga tidak tahu mau ke sini (PPU). Saya ikuti saja arah angin mau ke mana, disuruh ke mana," sambung Makmur.

Makmur bahkan mengungkapkan permintaan terhadap dirinya untuk menjadi kepala daerah diakui juga datang dari kampung halamannya, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada momentum Paskah akhir Maret 2024 lalu. Dukungan tersebut didapat saat dirinya berziarah ke makam orang tuanya di Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang.

"Di kampung saya juga. Saya digadang-gadang menjadi calon bupati. Semuanya bertanya, waktu saya pulang kampung untuk ziarah. Saya sampai takut, makanya saya cepat pulang. Saya takut keseleo ngomongnya, karena animo masyarakat meminta itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Pakkat, Sumatera Utara (Sumut), 10 September 1964 ini diketahui akan pensiun pada September 2024 mendatang. Selama itu pula, dia memastikan akan menyelesaikan segala tugas yang diberikan padanya hingga akhir masa jabatan.

"Saya nothing to lose saja bekerja. Persoalan orang bicara begitu, biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Perahu saya ini nanti berlabuhnya di mana, kembali ke Jakarta menjalankan tugas yang baru, atau bagaimana," tutup Makmur.

Pewarta : Nur Robbi Editor : Nicha R





Mantan Wakil Bupati PPU, Mustaqim (ist)

TAK LAGI BERMINAT MAJU PILKADA, MUSTAQIM: KONTESTASI POLITIK BUTUH UANG BANYAK

PPU - Mantan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dua periode dari 2008 hingga 2018, Mustaqim bisa dikatakan termasuk salah satu calon potensial jika melaju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, dirinya memastikan tidak akan mencalonkan kembali. Karena menurutnya, kontestasi politik sangat membutuhkan uang yang banyak.

Mustaqim mengatakan dirinya tidak ingin melaju di Pilkada tahun ini, mengingat dirinya yang tidak memiliki uang untuk melaju kembali. Ia menyatakan bahwa jika ingin berhasil menjadi calon legislatif ataupun kepala daerah harus menggunakan kekuatan modal yang juga cukup.

"Jujur saja, saya ini tidak punya uang. Enggak gratis. Ya kalau keinginan pasti semua orang ingin," jelasnya Senin (22/04/2024).

Dikatakan, meskipun menggunakan dukungan partai politik sekalipun juga harus memiliki modal yang cukup. Bahkan, secara track record bahwa dirinya telah memimpin dua periode pun tidak menjamin dirinya dapat berhasil memenangkan kontestasi tersebut.

"Saya juga sudah mencalonkan legislatif sebelumnya. Ya karena enggak pakai uang, ya enggak lolos juga. Berbeda dengan dahulu, saya melaju di dua periode itu ya enggak pakai uang," tambahnya.

Bahkan Mustaqim menyayangkan perubahan situasi politik sudah sangat berubah dari sebelumnya. Ia menceritakan saat pertama kali mencalonkan diri sebagai wakil bupati periode 2008-2013, warga PPU sangat anti dengan politik uang.

"Dulu itu waktu saya sosialisasi ke Kelurahan Maridan bahkan ada spanduk mereka menolak politik uang, sekarang sangat berbeda," terangnya.

Pria kelahiran 1949 ini menyadari bahwa strata pendidikan juga sangat berpengaruh pada kualitas berpolitiknya. Ia mengatakan sangat merindukan masa-masa saat dirinya mencalonkan sebagai wakil bupati, bahkan saat melakukan sosialisasi masa itu, dirinya sangat ditunggu.

"Saya merindukan lagi masa itu, kayaknya tidak ada lagi, hanya segelintir saja," tambahnya.

Mustaqim juga menegaskan

jika dirinya diminta untuk kembali berkontestasi, dirinya akan menegaskan terkait dengan permodalan ini. Dikarenakan menurutnya, percuma bicara visi dan misi jika pada hari pemilihan diberi serangan fajar semua dapat berubah drastis.

"Saya berani bertaruh, jika pun Rektor Unmul (Universitas Mulawarman) yang mencalonkan diri, jika tidak punya uang maka tidak akan menang," tegasnya.

la juga mengatakan dibanding dengan periode sebelumnya, periode kali ini tidak ada yang melakukan komunikasi kepada dirinya untuk berkontestasi bersama. Ia berharap siapa pun yang terpilih nanti bukan hanya dinilai karena uangnya saja, seolah orang baik hanya diukur dari berapa uangnya.

"Peluang korupsi pasca telah menjadi bupati itu banyak, tapi jangan sampai semuanya menjadi tidak baik karena hanya berfokus pada praktik politik uang dan akhirnya berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," pungkasnya.

Penulis: Nelly Agustina Editor: Nicha R





Lebih Dekat dengan Satu Klik

MEDIA KALTIM GRUP MENGUCAPKAN

TURUT BERDUKA CITA ATAS BERPULANGNYA



ISMAIL SUBLI (62 THN) KEPALA DESA BABULU LAUT

PERIODE 2022-2028

LAHIR DI HANDIL PENGHULU, 4 OKTOBER 1962 MENINGGAL DI BABULU, 22 APRIL 2024

SEMOGA AMAL IBADAH ALMARHUM DI TERIMA ALLAH SWT & BAGI KELUARGA YANG DITINGGALKAN DI BERIKAN KESABARAN & KETABAHAN

































PJ BUPATI PPU AKUI BANYAK PARTAI BUKA KOMUNIKASI SOAL PILKADA 2024

PENAJAM PASER UTARA - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengungkapkan telah banyak partai politik (parpol) yang yang membuka komunikasi dengannya baru-baru ini. Berkaitan dengan diri yang digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU 2024.

Meski tahapan Pilkada 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai mendatang, persiapan oleh penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati oleh berbagai parpol telah berjalan. Pembahasan terkait sosok yang akan memimpin daerah berjuluk Benuo Taka ini pada periode 2024-2029 juga mulai hangat diperbincangkan.

Direktur Produk Hukum dari Ditjen Otda Kemendagri ini menegaskan bahwa dirinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih fokus pada menjalankan tugas dari mandat yang diberikan saat ini.

"Saya nunggu arahan dari pimpinan dulu, Pak Presiden. Kan yang menugaskan saya ke sini (PPU) kan beliau. Ya saya tanya dulu, 'Pak setelah ini Saya mau Bapak ke manain," ucapnya saat ditanyai belum lama ini.

la mengakui juga saat ini memang banyak parpol yang menyatakan minat untuk mengusungnya menjadi balon bupati PPU. Walau begitu, ia tetap kukuh menunggu arah Presiden atas pekerjaan selanjutnya yang akan diberikan.

"Partai politik sudah banyak yang tanya ke saya. Dari Jakarta, dari mana-mana. "Bapak saja langsung, top ces". Itu kan kata kalian, kalau atasan saya belum tentu. Saya kan masih penugasan Pak Presiden, masih berlaku. Jadi saya tunggu dulu arahan Presiden," ungkap Makmur.



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat diwawancarai usai kegiatan buka puasa bersama insan pers PPU, Senin (8/4/2024) lalu. (Robbi/MKN)

Dalam komunikasinya dengan beberapa parpol itu, bahkan ada yang sampai menyatakan akan berkomunikasi dengan Presiden untuk memintanya. "Apakah kami (parpol) langsung minta ke Presiden? Saya bilang silakan saja, tapi yang jelas jangan saya yang minta kepada beliau. Kalau saya minta nanti dianggapnya (lain). Disuruh benahi PPU dengan IKN, (kok) sekarang jadi ke mana," sambungnya.

Meski begitu, ia tak menampik bila dirinya ke depan bisa jadi bakal maju dalam kontestasi demokrasi di PPU kali ini. Walau ia tetap tak bisa memutuskan semuanya atas kehendaknya sendiri.

"Semua akan ada jalannya. Kalau saya bilang 'tidak menutup kemungkinan' mendahului Yang Maha Kuasa saya. Kalau memang masyarakat dan pimpinan saya menyatakan setelah saya tugaskan ini, perlu akselerasi PPU dengan IKN, jadi siap laksanakan," jelasnya.

Untuk diketahui, Makmur dipercayai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi kepala daerah sementara di PPU sejak 19 September 2023. Tugas tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan pasca habisnya masa kepemimpinan pasangan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Hamdam periode 2018-2023.

Pria kelahiran Pakkat, Sumatera Utara (Sumut), 10 September 1964 ini diketahui akan pensiun pada September 2024 mendatang. Selama itu pula, dia memastikan akan menyelesaikan segala tugas yang diberikan padanya hingga akhir masa jabatan.

"Saya nothing to lose saja bekerja. Persoalan orang bicara begitu, biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Perahu saya ini nanti berlabuhnya di mana, kembali ke Jakarta menjalankan tugas yang baru, atau bagaimana," tutup Makmur.

Pewarta : Nur Robbi Editor : Nicha R



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat mengahdiri kegiatan Silaturahmi Syawal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kecamatan Sepaku di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Senin(22/4/2024). (Prokopim PPU for MKN)

SILAHTURAHMI PGRI SEPAKU, PJ BUPATI PPU INGATKAN PENTINGNYA PERAN GURU DALAM PENINGKATAN SDM

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kecamatan Sepaku di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Senin(22/4/2024). Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah atau negara.

Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu misi pembangunan PPU. Sebab SDM yang berkualitas merupakan salah satu modal utama keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diberbagai bidang.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk bersilaturahmi. Tetapi juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam upaya memajukan pembangunan bidang pendidikan di Bumi Benuo Taka," katanya.

Untuk mewujudkan itu, sambungnya, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Makmur menyebut saat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dan diselesaikan.

Di satu sisi, keberhasilan pembangunan bidang pendidikan harus mendapat dukungan dari semua elemen yang ada di daerah ini. Baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, termasuk organisasi profesi seperti PGRI.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia PPU harus benar-benar dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peran guru sangat penting dalam misi ini," jelas Makmur.

Kemudian PGRI sebagai organisasi profesi bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku, dan keahlian para guru anggota PGRI khususnya. Agar mampu melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Guru bermutu dan bertanggung jawab sebagai anggota inti organisasi profesi PGRI, merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang pada gilirannya hasil dari didikannya menjadi tulang punggung pembangunan.

"Peran guru sangat penting dalam membelajarkan siswa-siswinya. Artinya bahwa bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Makmur juga mengimbau para guru di PPU untuk senantiasa menjaga sikap dan perilaku. Karena selain sebagai pendidik, guru merupakan orang yang menjadi panutan dan contoh bagi murid-muridnya.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh guru di Kabupaten PPU khusus yang berada di kecamatan Sepaku yang telah berkontribusi besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah kita ini," tutupnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)





Rapat koordinasi yang diadakan oleh Otorita IKN bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kantor Otorita IKN, Balikpapan, pada hari Senin (22/04/2024). (Otorita IKN)

OTORITA IKN SIAPKAN MEKANISME PENGELOLAAN ASET HIBAH KABUPATEN KUKAR

NUSANTARA - Sejumlah area di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang termasuk dalam batas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), saat ini menjadi fokus utama dalam pengelolaan oleh pemerintah Otorita IKN.

Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan lahan, pengaturan aset fisik, hingga isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat.

Dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Otorita IKN bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kantor Otorita IKN, Balikpapan, pada hari Senin (22/04/2024), kedua pihak mendalami kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan aset di wilayah Kukar yang termasuk dalam batas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kukar Salehuddin mengungkapkan bahwa ada enam kecamatan di Kukar yang terintegrasi dalam batas kawasan IKN. Salehuddin menambahkan bahwa saat ini, tanggung jawab atas wilayah tersebut masih dipegang oleh Pemerintah

Daerah Kukar. Tanggung jawab ini akan terus berlanjut sampai diaktifkannya Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Otorita IKN, di mana kemudian akan ada proses penyerahan wewenang.

"Didasari dari pembagian wilayah maka seluruh aset yang ada di dalam wilayah itu (delineasi Kawasan IKN) baik yang dari Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten Kukar, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), nantinya menjadi milik Otorita IKN untuk dikelola lebih lanjut," jelas Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin.

"Kemudian ada proses penyerahan-penyerahan aset yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sedang berjalan, Pemerintah Daerah Kukar tentunya akan mendukung pembangunan untuk IKN sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara," jelas Alimuddin.

Menurutnya, terdapat beberapa inisiatif yang tengah diper-

siapkan menjelang pengelolaan penuh kawasan IKN oleh Otorita IKN, di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari guru hingga tenaga kerja terampil. "Ini sangat penting untuk mendukung IKN sebagai ibu kota yang futuristis dan adaptif," terangnya.

Dalam hal pengelolaan aset fisik, DPRD Kabupaten Kukar telah mengusulkan agar aset-aset tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama dengan Otorita IKN.

"Tentunya, kita berharap proses ini (penyerahan aset daerah) segera tuntas supaya kita nanti enak ketika melaksanakan fungsi Pemdasus," pungkas Alimuddin.

Koordinasi antara kedua pihak tersebut berperan sebagai jembatan penting untuk transparansi informasi dan mencapai kesepakatan mengenai kepemilikan wilayah. "Satu hal yang luar biasa bahwa Otorita IKN membuka diri seluas-luasnya," sebut Salehuddin dalam mengapresiasi keterbukaan Otorita IKN. (*/rls)

Pewarta: Robbi Syai'an

Editor: Nicha R





Ketua DPC PKB PPU, Irawan Heru Suryanto. (Robbi/MKN)

DPC PKB PPU RESMI BUKA PENDAFTARAN BACABUP DAN BACAWABUP PILKADA 2024

PENAJAM PASER UTARA -

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Penajam Paser Utara (PPU) resmi membuka penjaringan bagi bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup), Senin (22/4/2024).

Berbagai kriteria khusus dicari dalam upaya mewujudkan pembangunan di Benuo Taka yang sesuai visi kemajuan partai bergambar bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang ini.

Proses pendaftaran akan dilaksanakan mulai tanggal 22-25 April 2024, sedangkan pengembalian formulir pendaftaran akan diterima hingga tanggal 30 April 2024 mendatang.

PKB PPU memberikan jeda waktu yang cukup panjang bagi para calon untuk mengajukan diri dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

"Mulai besok, pertanggal 22 April, PKB PPU secara resmi membuka kesempatan bagi para putra-putri terbaik yang berminat mencalonkan diri sebagai pemimpin di Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkap Ketua DPC PKB PPU, Irawan Heru Suryanto.

Peluang ini dibuka bagi siapa pun yang memiliki kesempatan dan niat kuat untuk berkontribusi dalam memimpin PPU ke arah yang lebih baik. Dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi calon-calon potensial, PKB PPU menegaskan komitmennya untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

"Kami mengajak para calon untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa kehadiran mereka akan memberikan warna baru dan energi positif bagi pembangunan daerah ini," tambahnya.

Untuk diketahui, DPC PKB PPU sukses meraih 2 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Menduduki peringkat ke-4 dengan perolehan suara sebanyak 11.213 suara.

Oleh karena itu pihaknya masih membutuhkan tambahan kursi untuk memenuhi kuota persyaratan pencalonan. Model ini siap digunakan dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU pada 27 November mendatang.

"Kami berharap agar hasil dari Pilkada nantinya akan mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat PPU secara menyeluruh," tutup Irawan.

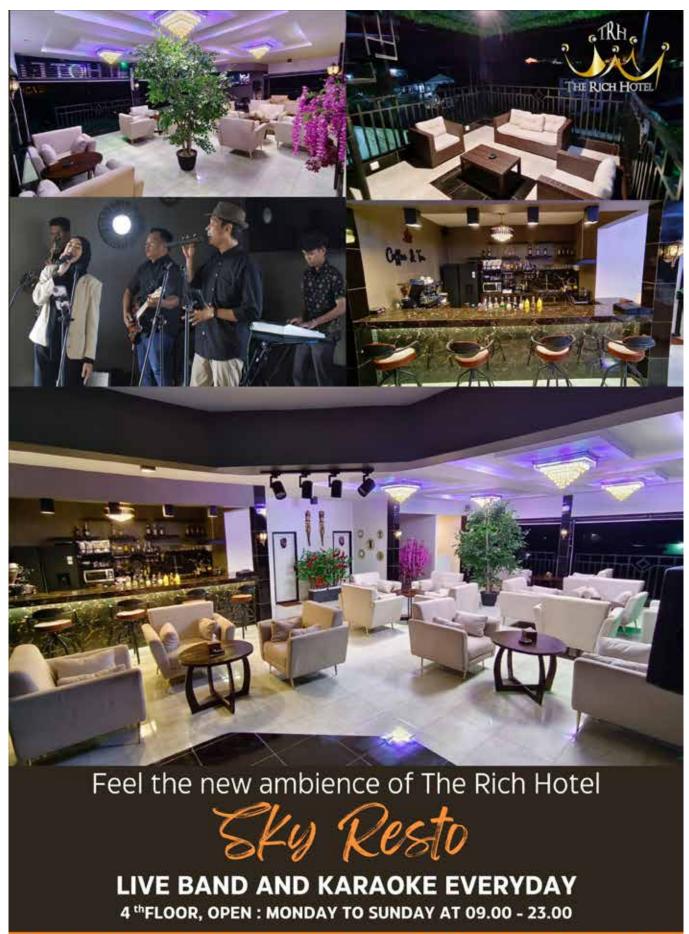
Pewarta : Nur Robbi Editor : Nicha R







Call/WA: +62 812-5651-9339



JL. PROPINSI KM. 14 PENAJAM PASER UTARA



RADARKUKAR

EDISI SELASA 23 APR 2024

AKTUAL & TERPERCAYA









Kebakaran bangunan kosong di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan. (Istimewa)

HAMPIR BERSAMAAN, TERJADI KEBAKARAN DI 2 LOKASI DI KUKAR

TENGGARONG - Musibah kebakaran terjadi hampir bersamaan di dua lokasi berbeda di Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni kebakaran rumah kosong di Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Kota Bangun, pada Senin (22/4/2024).

Di Kecamatan Kota Bangun, kebakaran terjadi di kawasan padat RT 1 dan RT 2 Desa Liang Ilir. Sebanyak 8 rumah habis dilalap si jago merah, sekitar pukul 10.00 Wita hingga menyebabkan 8 Kepala Keluarga (KK) dan 30 jiwa harus kehilangan tempat ting-

"Terjadi sekitar jam 10.00, (penyebab awal) korsleting listrik pak," ujar Kades Liang Ilir, Rodiani, melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (22/4/2024).

Kebakaran hebat pun menyebabkan 9 rumah lainnya ikut terdampak. Yang berisikan 11 KK dan 26 jiwa. "(Kendala) karena kawasan padat penduduk," tutup Rodiani.

Sementara musibah karan lainnya terjadi di Kecamatan Loa Janan yang meng-

hanguskan sebuah bangunan kosong. Tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku RT 1 Desa Loa Duri Ilir, sekitar pukul 09.00 Wita. Penyebab sementaranya pun sama, yakni diduga karena adanya arus pendek listrik dari rumah Abjuansyah.

Sebanyak 6 unit mobil damkar diturunkan, sehingga butuh waktu 40 menit api berhasil dijinakkan. Akibat, kerugian ditaksir mencapai Rp 150 juta.

Penulis: Muhammad Rafi'i

Editor: Nicha R









BACA HALAMAN A2



Tampil Beda, Irfan Kembalikan Formulir Bacalon Wawali Bontang Naik Angkot



Pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Bontang. (Dok).

Pengetap di SPBU KM 8 Diamankan Polisi, Sehari Bolak Balik 3 Kali Ngisi BBM

BONTANG - Polres Bontang berhasil mengamankan seorang pria berinisial Pa (39), pelaku pengetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU KM 8, Bontang, Sabtu (20/4/2024), sekitar pukul 23.00 Wita.

Kapolres Bontang, Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Reskrim, Iptu Hari Supranoto menjelaskan, pada awalnya anggota II Tipidter Satreskrim Polres Bontang sedang melakukan patroli, kemudian mencurigai satu mobil yang sedang mengisi BBM, dari SPBU KM 8 sebanyaktiga kali pengisian dalam sehari.

Sehingga anggota langsung melakukan pembuntutan terhadap mobil tersebut, sampai di Jalan Urip Sumoharjo, RT.12, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.

"Kami langsung melakukan pemberhentian saat pelaku tengah melakukan aksi pengetapan menggunakan mobil yang berisikan jerigen," ucapnya.

Barang bukti yang telah diamankan meliputi satu unit mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi KT 1224 DW, tiga buah jerigen berkapasitas 5 liter berisi Pertalite, sembilan buah jerigen berkapasitas 20 liter berisi Pertalite, satu selang panjang berukuran 1 meter, satu baskom, satu corong, satu gayung, satu barcode Pertamina, dan satu handphone

merek Oppo.

Hingga saat ini, polisi masih akan mendalami kasus tersebut. Bahkan pelaku dan barang bukti telah berada di Mapolres Bontang.

Tersangka dikenakan pasal 40 angka 9 UU RI nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara," pungkasnya.

Penulis: Dwi S Editor: Yusva Alam



Direktur. Darman; **Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi**: M Abduh Kuddu; Reporter: Yusva Alam (kooridnator), Nur Yahya, Iqlima Syih Syakurah **Kantor Redaksi**: Perum Pesona Bukit Sintuk JI Pupuk Raya, RT. 50. Blok F3 No 23A Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

RADARBONTANG.com dipayungi PT RADAR MEDIA MEGATAMA, dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.





Irfan bersama tim kembalikan formulir bacalon wawali Kota Bontang menggunakan angkot. (Dwi/RadarBontang).

Tampil Beda, Irfan Kembalikan Formulir Bacalon Wawali Bontang Naik Angkot

BONTANG - Anggota DPRD Bontang, Muhammad Irfan mengembalikan formulir di Sekretariat Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Bontang, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Uniknya, Irfan datang bersama para rombongan menggunakan transportasi Angkutan Kota (Angkot), yang dimana diiringi sebanyak 50 angkot se-Kota Bontang.

Irfan menjelaskan, tidak pernah menyangka jika partisipasi dari komunitas angkot di Bontang akan mengantarkan dirinya, bahkan menemani mengantarkan pendaftaran untuk maju di Pilkada 2024. "Alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka ada kejutan dari komunitas angkot yang bersedia mengantarkan kami untuk mempersembahkan diri maju sebagai calon Wakil Wali Kota," ucapnya saat diwawancarai, Senin (22/4/2024).

Dirinya menyatakan, jika komunitas angkot sendirilah yang menawarkan untuk mengantar serta mendampingi, bahkan dari pihaknya pun tidak ada meminta, jadi ini juga adalah bukti rasa simpati komunitas angkot terhadap tim.

"Dengan di sini banyaknya angkot, ini adalah salah satu bukti bahwa kita peduli terhadap kaum menengah ke bawah. Bahwa angkot adalah transportasi sejuta umat. Perlakuan itu

membuat saya terharu," paparnya.

Irfan berharap nantinya saat pergantian wali kota dan wakil wali kota ada perubahan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang, ataupun dari yang kemarin-kemarin. Bukan berarti yang laluitu tidak baik, akan tapi minimal ada yang lebih baik lagi nantinya.

"Dan juga minimal membawa harapan baru, ada wajah baru yang ikut di dalam Pilkada untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang mendatang. Sehingga dengan harapan bisa saling bersinergi dari Partai Golkar dan PDIP yang mana menurut masing penilaian yang terbaik," tutupnya.

Penulis: Dwi S Editor: Yusva Alam





Kegiatan pelatihan kerja Disnaker dibuka Wawali Najirah. (ist)

Wawali Buka Pelatihan Kerja Disnaker, Diikuti 632 Peserta Libatkan 18 LPK

BONTANG - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang membuka pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi Senin (22/4/24) di Auditorium 3 Dimensi.

Sebanyak 29 unit pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi dengan total 632 peserta, yang melibatkan 18 LPK di Bontang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Najirah.

Najirah mengatakan, bahwa pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Besarnya kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang terdidik, memiliki kompetensi, dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi,

maka salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bersifat profesionalisme.

Permasalahan ketenagakerjaan bukan persoalan pemerintah daerah semata, sebagaimana pemberitaan di media, bahwa di negara-negara maju juga mengalami permasalahan tenaga kerja atau pengangguran yang disebabkan karena tingginya masyarakat tergantung pada ketersediaan lapangan kerja.

"Untuk itu, kita harus segera merubah pola demikian, masyarakat kita harus bergegas untuk merubah dirinya menjadi tenaga kerja yang handal dan mandiri. Insyaallah pemerintah daerah akan memfasilitasi dengan pemberian pelatihan, seperti yang sedang dilakukan sekarang ini," ujarnya.

Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan pelatihan ini berlangsung paling lama sebulan penuh. Diharapkan peserta mampu mengikuti pelatihan dengan baik sampai akhir, karena yang dilatih ini merupakan standarisasi kompetensi dari BNSP.

"Disnaker tidak ingin hanya melatih orang agar bisa bekerja di perusahaan, namun melatih masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang baru," jelasnya dalam sambutan. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam







EDISI SELASA 23 APR 2024

AKTUAL & TERPERCAYA







TPFT Hadir di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan



Plt. Kepala Karantina Kaltim, Tasrif saat meninjau langsung pengiriman ekspor 324 kg Kerang Dara tujuan Singapura.

PERMUDAH EKSPORTIR, KARANTINA KALTIM DAN INSTANSI TERKAIT RESMIKAN TPFT DI BANDARA SAMS

BALIKPAPAN – Karantina Kalimantan Timur bersama entitas Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan melakukan soft launching Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sebagai bagian dari Implementasi NLE (National Logistic Ecosystem) atau Ekosistem Logistik Nasional, pada Senin (22/4/2024).

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, Endah Purnamasari mengatakan, NLE merupakan sebuah sistem reformasi dalam bidang logistik tanah air yang bertujuan untuk mendorong performa logistik dan meningkatkan investasi. Implementasi NLE diharapkan dapat memperbaiki kinerja logistik nasional menjadi lebih cepat, terstruktur, sistematis dan biayanya dapat ditekan.

"Saya berharap setelah peresmian TPFT dan impementasi NLE ini, akan dilakukan sosialisasi baik itu dari Bea Cukai, Karantina, Angkasa Pura I, maupun AP Logistik kepada pengguna jasa karena mereka nantinya akan menanyakan mengenai sistem yang baru ini. Selain itu, ke depannya akan diberlakukan Single Billing di Bandara Internasional SAMS," ujarnya.

Sementara itu Plt. Kepala Karantina Kaltim, Tasrif mengatakan, rapor hijau Stranas PK yang saat ini dipegang oleh Pelabuhan Balikpapan merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar berbagai instansi di Balikpapan.

"Soft Launching TPFT di Bandara SAMS ini menjadi tonggak penting menuju pelayanan ekspor di Bandara SAMS yang efektif, efisien dan transparan. Saat ini sudah ada 2 pengguna jasa Karantina Kalimantan Timur yang sudah 100 persen menggunakan SSM Ekspor," jelasnya.

Tasrif menambahkan, selama bulan Januari hingga Maret 2024 ada sebanyak 153 sertifikat yang dicetak melalui SSM Ekspor dengan komoditas Kerang Dara dengan total volume 177.349 kg tujuan Thailand dan Malaysia yang diekspor melalui Kargo Bandara SAMS.

"Pada acara ini juga dilakukan pelepasan ekspor 324 kg Kerang Dara tujuan Singapura milik eksportir CV. Tiga A. Sebelum diekspor, Kerang Dara diperiksa secara fisik oleh Pejabat Karantina untuk memastikan komoditas bebas dari hama penyakit. Selain itu, diperiksa pula kelengkapan dokumen yang diperlukan," jelasnya.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan komoditas dinyatakan bebas dari hama penyakit, serta dokumen lengkap, Karantina Kalimantan Timur menyerahkan Sertifikat KI-DI (Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Ekspor) kepada eksportir sebagai bukti telah lapor karantina yang diserahkan secara langsung oleh Plt. Kepala Karantina Kaltim, Tasrif.

Karantina Kaltim mengharapkan ke depannya dengan diresmikannya TPFT ini, akan semakin mempermudah eksportir melalui simplifikasi dan efisiensi sehingga semakin bertambah pengajuan ekspor melalui SSm Ekspor baik dari segi volume, keberagaman komoditas, maupun dari segi jumlah pengguna jasa.

Penulis: Aprianto Editor: Nicha R



METRO

GM AP I Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Ahmad Syaugi Shahab saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di terminal cargo, Senin (22/4).

TPFT HADIR DI BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN, GM AP1: INI AKAN TINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

BALIKPAPAN - Kantor Otoritas Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Balai Besar Karantina Kaltim dan Angkasa Pura I Bandara SAMS Sepinggan meresmikan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sebagai bagian implementasi dari National Logistic Ecosystem (NLE), pada Senin (22/4/2024).

General Manager Angkasa Pura I Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi terhadap penambahan fasilitas TPFT di bagian terminal cargo tersebut.

"Selalu mengingatkan kekurangan yang ada termasuk failitas. Kami intinya apapun yang dibutuhkan Angkasa Logistik pasti akan kami usanakan penuhi," ujarnya.

Lebih lanjut Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan, dengan hadirnya Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu ini maka bisa membuat rasa kepercayaan masyarakat pengguna pengiriman cargo semakin tumbuh. Bahkan, dengan hadirnya TPFT ini bisa memaksimalkan waktu dan nilai ekonomis masyarakat pengguna cargo.

"Tentunya dengan hadirnya

TPFT ini akan lebih baik lagi untuk kita semua. Kepercayaan ke kita tentunya semakin meningkat. Dan trush masyarakat juga pasti semakin baik," jelasnya.

Diharapkannya pelayanan ekspor dan impor di TPFT tersebut bisa optimal baik di domestik maupun internasional. "Dengan waktu yang cepat dan murah, bisa memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Dan masyarakat juga bisa memonitoring barang yang dikirim atau akan diterima di sini," tutupnya.

Penulis: Aprianto Editor: Nicha R



Sejumlah pekerja wanita dan istri pekerja KPB mengikuti Beauty Class x Make Over.

SUPER BEAUTY IS YOU, CANTIK MAKSIMAL ALA KARTINI KPB

BALIKPAPAN - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Kilang Pertamina Balikpapan (PT KPB) menggelar acara Beauty Class x Make Over dengan tema "5uper Beauty is You" di selasar gedung New Site Office (NSO) PT KPB pada Senin (22/4/2024).

Corporate Secretary PT KPB, Asep Sulaeman mengatakan, kegiatan yang juga merupakan rangkaian perayaan usia ke-5 tahun PT KPB ini berkolaborasi dengan brand kosmetik ternama dalam negeri, Make Over, dan dihadiri oleh sekitar 90 pekerja perempuan PT KPB serta perwakilan istri pekerja.

"Selama sekitar 2 jam, peserta dengan antusias mengikuti beauty class dan mendapatkan tips serta trik dari Make Up Artist (MUA) berpengalaman. Mereka juga berkesempatan untuk praktek langsung menggunakan

make up sesuai dengan karakter wajah masing-masing, yang dapat digunakan sehari-hari untuk tampil cantik dan fresh sepanjang hari, tanpa terlihat berlebihan," ujarnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, selama sesi berlangsung suasana penuh semangat dan antusiasme terasa di seluruh ruangan. Peserta dengan antusias mengikuti setiap langkah yang diajarkan, peserta juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada instruktur dan berbagi pengalaman dengan sesama rekan kerja. Aura keceriaan dan kegembiraan terpancar dari wajah-wajah para peserta, menambah warna ceria dalam perayaan Hari Kartini kali ini.

"Dalam momen peringatan Hari Kartini ini, kami di PT Kilang Pertamina Balikpapan ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perwira Perempuan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga keluarga serta berperan aktif dalam penyelesaian proyek," jelasnya.

Melalui Beauty Class ini, pihaknya berharap dapat memberikan dukungan lebih lanjut kepada para perempuan di perusahaan untuk tetap tampil profesional dan percaya diri dalam menjalani berbagai peran, baik di tempat kerja maupun di rumah.

"Selain memberikan keterampilan positif dalam tata rias, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk internal engagement dalam membangun budaya perusahaan, sehingga ekosistem lingkungan kerja menjadi positif dan menyenangkan," tutup Asep Sulaeman.

Penulis: Aprianto Editor: Nicha R





Foto: Bajuri beserta rombongan dari Partai Demokrat saat mendaftar di kantor PKB. (Dwi/RadarBontang).

SERIUS MAJU BACALON WAWALI BONTANG, BAJURI DAFTAR DI TIGA PARPOL

BONTANG Mantan Bhabinkamtibmas Kelurahan Loktuan, Ahmad Bajuri menyatakan siap maju sebagai bacalon wali kota Bontang pada pilkada 2024 mendatang. Keseriusannya itu ditunjukkan dengan mendaftar di 3 partai politik.

Bajuri menjelaskan, keinginannya untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bontang adalah salah satunya, ingin membangun Kota Bontang lebih maju lagi dan juga lebih sukses ke depan. Bahkan visi dan misi yang berkelanjutan akan disampaikan nantinya pas harinya tiba.

"Semuanya telah kami persiapkan dengan matang, nanti akan saya sampaikan visi misi berkelanjutan jika harinya sudah tiba," ucapnya saat ditemui awak media, Senin (22/4/2024).

Sebelumnya, Bajuri menjelaskan bahwa dirinya telah lama mengabdi di kepolisian. Secara

otomatis pengabdian ini tidak ingin terputus begitu saja, sehingga ada berkelanjutan yang optimal dan secara global.

"Jangan sampai pengabdian yang pernah saya lakukan terputus begitu saja," paparnya.

Bajuri berharap nantinya di Pilkada 2024 ini berjalan dengan aman, sukses, dan semuanya juga dalam keadaan damai. Tidak ada permasalahan sekecil apapun, dalam artian Pilkada dapat berjalan dengan baik.

"Poin yang paling penting ialah ingin membangun Kota Bontang dengan harapan bersama, insyaallah berjalan dengan lancar. Tetap optimistis dan usaha, selebihnya biar yang di atas yang menentukan," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa Bajuri telah menjadi kader Partai Demokrat sebelum masa Pemilu Legislatif (Pileg) hingga saat ini. Hal itu diungkapkan Sumardi selaku Tim Penjaring Partai Demokrat.

Diketahui pula, Bajuri telah mendaftar di tiga partai politik, meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, serta Partai Golongan Karya (Golkar).

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC Partai PKB Bontang, Firman Nawawi mengatakan, jika partainya masih membuka secara lebar untuk pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontana.

"Kami masih membuka peluang, siapa saja boleh bergabung di PKB, dan pendaftaran ini berlaku hingga 25 April 2024. Bahkan pendaftaran bisa melalui website, sehingga kami akan proseskan ke DPP langsung," tutupnya.

Penulis: Dwi S Editor: Yusva Alam







RADAR PASER

EDISI SELASA 23 APR 2024

AKTUAL & TERPERCAYA





DPRD SODORKAN 9 REKOMENDASI LKPJ BUPATI PASER 2023



Penyerahan sertifikat program Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024

PEMKAB DAN BPN PASER BAGIKAN 525 SERTIFIKAT DI DESA RANGAN

PASER - Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024 garapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI guna mempermudah kepengurusan sertifikat, kini hadir di Kabupaten Paser.

Kehadiran program itu mulai terealisasi, salah satunya di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Paser menyerahkan sebanyak 523 sertifikat yang akan diberikan secara bertahap.

"Melalui program ini, 523 sertifikat sudah selesai dengan realisasi 2023 secara keseluruhan sebanyak 5.661 bidang yang akan diserahkan secara bertahap," kata Bupati Paser, Fahmi Fadli, melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser, Romif Erwinadi, Senin (22/4/2024).

Selain program ini, dijelaskan Fahmi, Pemkab Paser dan Kantor BPN Kabupaten Paser turut menjalankan program lain, diantaranya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 20 ribu bidang di 2024.

Selain itu, redistribusi tanah yang rencananya berada di Desa Lambakan, Desa Pasir Mayang dan Desa Pondong Baru. Penatausahaan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) di Desa Jone serta Hak Guna Usaha (HGU) PT Borneo Indo Subur yang akan dikelola sebagai reforma agraria.

"Yang patut kita apresiasi, program ini dapat mendorong pelaku UMKM untuk terlibat pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Fahmi mengingatkan masyarakat, agar segera mengurus tanah ke Kantor BPN Kabupaten Paser. Termasuk terhadap aparat pemerintah, agar memberikan pelayanan prima, efektif dan efisien kepada masyarakat yang hendak mengurus administrasi pertanahan.

"Jangan takut atau malas untuk berurusan dengan pihak pertanahan," katanya.

Fahmi turut memberikan selamat kepada penerima sertifikat. Bukan hanya masyarakat, namun juga sertifikat hak milik rumah ibadah dan sertifikat hak pakai tanah pemerintah desa. Bagisnya, sejumlah upaya ini dilakukan guna mengurai konflik dimasyarakat.

"Semoga tidak ada lagi konflik atau sengketa tanah sehingga lingkungan menjadi aman, rukun dan damai," pungkasnya.

Pewarta: Bhakti Sihombing Editor : Nicha R



DPRD SODORKAN 9 REKOMENDASI LKPJ BUPATI PASER 2023

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan rekomendasi Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser 2023, melalui rapat paripurna di Gedung Baling Seleloi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Senin (22/4/2024).

Hal itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser dengan menyodorkan sembilan rekomendasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Salah satunya, rendahnya Penerimaan Pajak Daerah pada 2023, yaitu hanya sebesar 68,77 persen. Dengan begitu, DPRD Kabupaten Paser, menekankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser untuk menyiapkan strategi peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

"Dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah," kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur.

Selain itu, memantau dan evaluasi secara rutin, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah, menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta inovasi dengan melakukan kajian-kajian dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi peluang bagi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Selain itu, kurangnya petugas Penilai Pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan Penilaian (Appraisal) terhadap objek pajak pada Bapenda Kabupaten Paser. Sehingga DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Kabupaten Paser untuk melakukan kerjasama.

"Kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, dalam rangka untuk membantu Bapenda dengan menempatkan petugas penilai pajak yang berkompeten." katanya.

Terkait pemenuhan mandatory spending sebesar 20 persen pada



Rapat paripurna DPRD Kabupaten Paser di Gedung Baling Seleloi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser agar proses perencanaan dan penganggaran.

"Khususnya untuk kegiatan fisik dapat sepenuhnya dialokasikan pada APBD murni, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan demi menghindari SILPA yang besar pada Perubahan APBD, dikarenakan waktu pelaksanaan yang terbatas," ungkapnya.

Terkait penerimaan Pajak Reklame, yaitu sekitar Rp 1 miliar lebih dan melebihi dari target yang ditetapkan, DPRD Kabupaten Paser memberikan apresiasi terkait capaian kinerja tersebut, namun demikian pihaknya menganggap bahwa potensi penerimaan pajak reklame masih cukup besar.

Sehingga perlu menekankan kepada Pemkab Paser, untuk melaksanakan strategi, yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan terkait Pajak Reklame secara berkesinambungan, membangun sistem data yang akurat, serta memberikan reward dan punishment sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait masih belum tercapainya target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada 2023, realisasi hanya sebesar 1,38 persen dari target sebesar 2,32 persen. DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser untuk dapat mengambil langkah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi lainnya, dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser untuk melakukan kolaborasi pembiayaan melalui Public Private Partnership (PPP).

"Sehingga memungkinkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari

sektor swasta, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat," ungkapnya.

Terkait RKPD sebagai Tematik Pembangunan Tahunan pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang dipilih.

Sementara dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj, agar memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dengan upaya mengatasi permasalahan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sehingga adanya keseimbangan.

Ke depannya, dalam penyusunan dokumen LKPj, DPRD Kabupaten agar memperhatikan urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPj dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Kabupaten Paser terhadap hasil pembahasan LKPj Bupati Paser 2023 dengan OPD terkait.

"Tentu setiap rekomendasi akan menjadi pertimbangan kami, ini akan kami bahas bersama OPD terkait, sehingga ke depannya bisa terwujud penyempurnaan LKPj," ucap Fahmi Fadli.

Untuk diketahui, dalam penyampaian LKPj ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Fadly Imawan serta dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala OPD.

Pewarta: Bhakti Sihombing Editor : Nicha R





KORAN **DIGITAL**



RADAR **SAMARINDA**

EDISI SELASA 23 APR 2024

AKTUAL & TERPERCAYA







PERSATUAN GURU HONORER KOTA SAMARINDA BERSILATURAHMI DENGAN WALI KOTA

DISPORAPAR AKUI MASIH BANYAK "PR" SOAL POTENSI EKRAF DI SAMARINDA

SAMARINDA - Ekonomi Kreatif (ekraf) digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa yang akan datang oleh Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi sempat berjanji untuk memberikan dukungan penuh terhadap badan ekonomi kreatif agar mampu memberikan dampak nyata dalam perekonomian Indonesia.

Di Samarinda sendiri, baru-baru ini Pansus II DPRD Samarinda membahas tentang rancangan peraturan daerah mengenai ekonomi kreatif. Hal itu bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Samarinda. Kemudian Media Kaltim coba untuk menanyakan mengenai perkembangan ekonomi kreatif kepada Disporapar Samarinda.

Saat ditemui di kantor Disporapar, Jln. Dahlia, Samarinda, pada Senin (22/4/2024), Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Agnes Gering Belawing, menerangkan bahwasanya dukungan ekonomi kreatif di Samarinda sempat terhambat karena tiadanya dasar hukum daerah yang bisa menjadi patokan arah ekonomi kreatif. Itu menjadi PR, sebab pelaku ekonomi kreatif di Samarinda sudah banyak namun belum ada hukum daerah yang menaungi.

"Pelaku (Ekonomi Kreatif) itu kita sudah ada, tapi secara hukum pengembangan dari pemerintah daerahnya belum ada. Itu menjadi tugas kami untuk mengumpulkan data hukumnya dulu, baru kita ke Bapedda, itulah yang menjadi PR kami," terangnya.

Setidaknya ada 17 sub sektor dari ekonomi kreatif, di antaranya ialah pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan hingga aplikasi. Dari 17 itu, Agnes menuturkan Samarinda memiliki setiap sub sektornya.

Di tahun 2023, matrik tentang ekonomi kreatif kemudian ditetapkan lantas kegiatannya mulai dilaksanakan. Setidaknya ada dua kegiatan, yang pertama mengenai revitalisasi ruang ekonomi kreatif dan yang kedua ekosistem ekonomi kreatif. Untuk membangun ekosistemnya,



Agnes beserta jajaran Pengembang Ekonomi Kreatif saat ditemui di Disporapar Samarinda (Khoirul Umam/mediakaltim)

maka itu meliputi produksi, SDM, pendidikan hingga pelatihan.

Agnes juga menyebutkan bahwa data pelaku ekonomi kreatif di Samarinda yang ada di Borang (Aplikasi Resmi Kemenparekraf) ada sebanyak 375 orang yang terbagi menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, Samarinda dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Dari penuturan Agnes setidaknya ada beberapa sektor yaitu kuliner, fashion, musik, fotografi, seni pertunjukan hingga kriya. Sektor tersebut diharapkan mampu berdampak kepada sektor lain dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Samarinda.

Hanya saja, dari penjelasan Nur, salah satu anggota pengembangan ekonomi kreatif, Samarinda masih belum ditetapkan keunggulannya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Kemenparekraf). Tahun lalu, sudah ada rencana pelaksanaan pertemuan, akan tetapi itu tertunda dikarenakan oleh beberapa kendala yang ada, salah satunya adalah anggaran. Sehingga hingga saat ini Samarinda belum ditentukan sebagai kota kreatif berbeda dengan Balikpapan atau Tenggarong yang sudah lebih dulu.

"Tahun kemarin kami sudah dijanjikan, tapi ternyata batal datang karena ada satu dan lain hal," sahutnya.

Di tahun ini, pengembangan ekonomi kreatif Samarinda telah mendapatkan anggaran sendiri untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan begitu, pengembangan ekonomi kreatif di Samarinda dapat dilaksanakan, salah satunya akan diselenggarakan Mahakam Fashion

Festival di bulan Juni nanti dengan mengangkat tema kain ulap doyo. Harapannya kegiatan tersebut akan melibatkan banyak sektor ekonomi kreatif lainnya juga menjadi upaya pemasaran.

Terlepas dari pada itu, Agnes mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan kota lainnya dalam mendukung ekonomi kreatif di Samarinda. Ia beranggapan Samarinda yang luas kotanya tidak begitu besar perlu melakukan kolaborasi dalam menjual produk-produk ekonomi kreatif.

"Ini memang susah, tapi bisa. Karena kalau kita tidak kolaborasi Samarinda kan punya wilayah yang kecil dan hutannya juga sudah habis jadi memang kita perlu menekankan kolaborasi," pangkasnya.

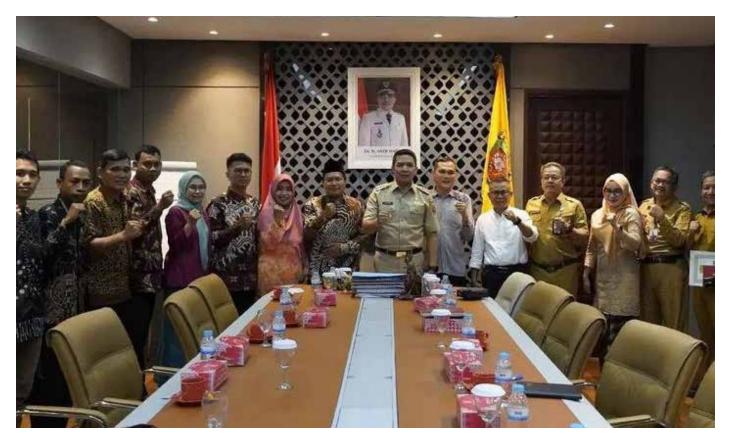
Agnes mengakui Samarinda secara ekonomi kreatif sangat jauh ketinggalan dengan kota-kota lain dalam penetapannya. Maka pengembangan ekonomi kreatif masih menunggu penetapan dari Kemenparekraf. Namun Agnes optimis kalau Samarinda dapat menyusul kota-kota lain di Kalimantan Timur. Itu dikarenakan pelaku ekonomi kreatif di Samarinda sangatlah banyak dan unggul.

Di akhir, Agnes melihat sektor kriya dari pendaurulangan barang bekas akan menjadi fokus ke depannya di Samarinda. Selain karena anjuran dari Wali Kota Samarinda, ia merasa hal itu perlu dilakukan saat sampah di Samarinda semakin menumpuk. Bagaimanapun ekonomi kreatif bisa jadi salah satu alternatif ekonomi daerah seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi.

Pewarta: Khoirul Umam

Editor: Nicha R





Silaturahmi yang dilakukukan Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda dengan Walikota Samarinda Andi Harun

PERSATUAN GURU HONORER KOTA SAMARINDA BERSILATURAHMI DENGAN WALI KOTA

SAMARINDA Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Senin, (22/4/2024), di ruang rapat lantai I gedung Balaikota Samarinda.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Samarinda menyampaikan selamat kepada tenaga guru honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada akhir tahun 2023, sebanyak 782 guru honorer telah diangkat menjadi PPPK.

Andi Harun juga mengapresiasi kehadiran perwakilan Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda. Langkah ini dianggap sangat tepat karena memungkinkan komunikasi langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pertanyaan tentang kepastian status dan tugas yang akan dilaksanakan dapat diajukan secara langsung kepada pihak yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai persoalan ini.

"Menjadi PPPK berarti menjadi bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Para guru honorer yang telah diangkat sebagai PPPK akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti ASN. Selain itu, mereka berhak menerima gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," jelasnya Andi Harun

"Oleh karena itu, para PPPK harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menjaga kedisiplinan, dan memberikan contoh yang baik sebagai aparatur negara," lanjutnya.

Terkait dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK yang belum diterima, Andi Harun menjelaskan bahwa proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) berlangsung. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kepastian hak. Sejak tanggal 1 April 2024, para tenaga guru honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai PPPK tetap akan mendapatkan haknya (gaji dan TPP). Meskipun ada kemungkinan beberapa orang menerima SK setelah tanggal tersebut, hak dan kewajiban mereka berlaku sejak 1 April.

"Walaupun setelah 1 April diterima, katakanlah SKnya mungkin ada yang sampai menerima 1 Mei, katakanlah ini yang terbuku ya, atau 2 Mei atau setelahnya, cuma hak dan kewajibannya berlaku sejak 1 April," tandas Andi Harun.(adv/ diskominfosamarinda)

